



Fundamentalism in Indonesian Political History: A Biography of Isa Anshary

Yusril Fahmi Adam*
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta, Indonesia
21201022002@student.uin-suka.ac.id

Imas Emalia
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta, Indonesia
imas.emalia@uinjkt.ac.id

Abstract

Purpose

This study aimed to uncover Muslem scholar and politician, Isa Anshary's thought and practices of the fundamentalism in political activities that were not in Indonesian Islamic historiography.

Method

This qualitative study used a library research design which depended on the primary data of written literature or archives related to the research problem. The researchers read the data sources carefully to identify Isa Anshary's thought and practices of fundamentalism. The collected information were verified to unveil his thought, ideas or practices of fundamentalism in political activities.

Results/Findings

The study identified that Isa Anshary was a figure belonging to the fundamentalism group. His fundamentalism was a result of the strong influence of Al-Afghani, Abduh, Ridla and A Hassan. These various influences had become a stimulus for Isa Anshary to voice Islamic ideology and show a tough attitude in politics.

Conclusion

This study concluded that Isa Anshary's fundamentalism in politics was a response to the post-independence political situation which was considered unsettled and aimed to protect the Islamic faith from the threat of secularism and communism.

Keywords

fundamentalism, Islamic ideology, Islamic politic

*) Corresponding Author

Abstrak

Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pemikiran dan praktik fundamentalisme cendekiawan dan politisi Muslim, Isa Anshary dalam kegiatan politik yang tidak tercatat dalam historiografi Islam Indonesia.

Metode

Penelitian kualitatif ini menggunakan desain penelitian kepustakaan yang mengandalkan data primer berupa literatur tertulis atau arsip yang berkaitan dengan masalah penelitian. Peneliti membaca sumber data dengan cermat untuk mengidentifikasi pemikiran dan praktik fundamentalisme Isa Anshary. Informasi yang terkumpul diverifikasi untuk mengungkap pemikiran, gagasan atau praktik fundamentalisme Isa Anshori dalam kegiatan politik.

Hasil/Temuan

Kajian tersebut mengidentifikasi bahwa Isa Anshary adalah seorang tokoh yang termasuk dalam kelompok fundamentalisme. Fundamentalismenya adalah hasil dari pengaruh kuat Al-Afghani, Abduh, Ridla dan A Hassan. Berbagai pengaruh tersebut menjadi stimulus bagi Isa Anshary untuk menyuarakan ideologi Islam dan menunjukkan sikap yang keras dalam politik.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa fundamentalisme Isa Anshary dalam politik merupakan respon terhadap situasi politik pascakemerdekaan yang dianggap tidak menentu dan bertujuan untuk melindungi akidah Islam dari ancaman sekularisme dan komunisme.

Kata Kunci

fundamentalisme, ideologi Islam, politik Islam

المخلص

الهدف

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن أفكار وممارسات الباحث والسياسي المسلم، أصولية عيسى أنصاري في الأنشطة السياسية التي لم يتم تسجيلها في تاريخ الإسلام الإندونيسي.

الطريقة

يستخدم هذا البحث الكيفي تصميم بحث مكتبي يعتمد على البيانات الأولية في شكل مؤلفات أو أرشيفات مكتوبة تتعلق بمشاكل البحث. ويقراً الباحثون مصادر البيانات بعناية لتحديد أفكار وممارسات أصولية عيسى أنصاري. يتم التحقق من المعلومات التي تم جمعها للكشف عن أفكار أو ممارسات أصولية عيسى أنصاري في الأنشطة السياسية.

النتائج

حددت الدراسة أن عيسى أنصاري كان شخصية تنتمي إلى جماعة الأصولية. أما أصولها فهي نتيجة النفوذ القوي للأفغاني وعبد ورضلة وحسن. وأصبحت هذه التأثيرات المختلفة حافزاً لعيسى أنصاري للتعبير عن الأيديولوجية الإسلامية وإظهار موقف متشدد في السياسة.

الخلاصة

خلصت هذه الدراسة إلى أن أصولية عيسى أنصاري في السياسة هي استجابة للوضع السياسي بعد الاستقلال الذي يعتبر غير مؤكد ويهدف إلى حماية العقيدة الإسلامية من خطر العلمانية والشيوعية.

الكلمات الرئيسية

الأصولية، الفكر الإسلامي، السياسة الإسلامية

PENDAHULUAN

Diskursus dengan tema politik Islam yang terjadi dalam sejarah pasca kemerdekaan Indonesia merupakan pembahasan yang memberikan perhatian besar tidak hanya bagi sarjana Muslim Indonesia, melainkan juga sarjana Barat. Beberapa sarjana tersebut yang membahas partai politik Islam serta partisipasi dalam pemilu perdana di Indonesia tahun 1955 adalah Feith (1995), Madinier (2013) dan juga Noer (1987). Selain itu, terdapat juga pembahasan politik Islam dengan fokus pada perdebatan antara ideologi Islam dengan nasionalis-sekular serta komunis seperti karya Samsuri (2004), Suhelmi (2014), dan Fauzan (2019). Meskipun demikian, pembahasan secara spesifik tentang karakteristik seorang aktor politik di balik pembahasan tentang politik Islam tersebut masih terbatas.

Perkembangan diskursus politik Islam di Indonesia oleh beberapa sarjana di atas menemukan bahwa berbagai partai politik yang bertarung di dalam pentas perpolitikan tersebut menggunakan semangat ideologi yang diyakininya, sehingga tidak jarang terdapat pertentangan antara satu dengan yang lainnya. Sebenarnya, dualisme ideologi pada pasca kemerdekaan bermuara pada awal tahun 1920-an dengan apa yang disebut sebagai “dasawarsa ideologi”, karena pada periode tersebut berbagai ideologi telah muncul sebagai identitas suatu kelompok (Fauzan & Fata, 2019, p. 5). Sehingga pada awal tahun 1950-an, dikotomi antara dua ideologi tersebut semakin mengerucut kepada politik praktis, yakni ideologi Islam yang sebagian besar diwakili oleh Partai Masyumi dan ideologi Nasionalis-Sekular yang di dalamnya terdapat partai besar seperti Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Partai Komunis Indonesia (PKI) (Suhelmi, 2014, p. 32). Beberapa partai politik tersebut kemudian menunjukkan sikap politiknya sesuai dengan prinsip ideologinya masing-masing. Lebih dari itu, terdapat pula sikap fundamental yang dilakukan oleh beberapa tokoh di dalam arena politik untuk mempertahankan dan memperjuangkan ideologi yang dianutnya, salah satunya adalah Isa Anshary.

Selain sebagai politikus partai Masyumi, Isa Anshary juga merupakan seorang ulama yang berasal dari Persatuan Islam (Persis) yang sering menunjukkan perannya sebagai fundamentalisme Islam di dalam berpolitik (Wildan, 2015, p. 169). Fundamentalisme yang terdapat dalam Isa Anshary disebabkan karena ia dikenal sebagai tokoh yang keras untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara dan juga radikal terhadap siapapun yang dianggap tidak sejalan dengan ideologi Islam. Dalam perkembangan sejarah agama, istilah fundamentalisme memiliki makna yang cenderung negatif. Hal ini disebabkan karena golongan fundamentalis dianggap memiliki pola pikir yang sempit, menunjukkan tindakan yang militan, ekstrim, menganggap kelompoknya adalah yang paling benar dan di luar dari mereka adalah salah (Ahdar, 2017). Selain itu, fundamentalisme biasanya berdampingan dengan isu kebangkitan politik sebuah kelompok yang berfungsi sebagai respon atas ketidakpuasan terhadap sistem pemerintah yang sedang berlangsung (Nugraha, 2018). Fundamentalisme dalam pandangan Isa Anshary, tidak sepenuhnya dinilai dalam konotasi yang negatif, melainkan terdapat pula nilai positif bagi perkembangan umat Islam di Indonesia. Fundamentalisme dalam konteks peristiwa politik Isa Anshary itulah yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

Dalam perkembangannya, fundamentalisme telah menghasilkan berbagai ide pokok yang seringkali oleh para sarjana diangkat bersamaan dengan isu-isu yang lainnya seperti politik dan agama (Mikail, 2020). Fundamentalisme juga diangkat sebagai pembahasan bersamaan dengan isu feminisme yang seharusnya tidak membelenggu hak-hak dan kewajiban perempuan terhadap kehidupan sosial maupun politik (Mulia, 2021). Sementara itu, relasi antara kajian terdahulu di atas dengan penelitian ini, adalah ingin membahas adanya hubungan antara fundamentalisme dengan politik, yakni Isa Anshary.

Berkaitan dengan Isa Anshary, terdapat pula kajian terdahulu yang telah membahasnya, antara lain artikel yang ditulis oleh Fauzan & Fata (2019). Dalam artikel tersebut, Isa Anshary disebutkan memiliki implikasi besar bagi organisasi Persis dan juga memiliki perbedaan pemikiran dengan sahabat seperjuangannya, M. Natsir yang disebabkan perbedaan perjalanan intelektual keduanya. Isa Anshary merupakan pembelajar yang mandiri

dan otodidak, sedangkan Natsir mendapatkan pendidikan formal di sekolah Belanda seperti *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO) dan sebagainya. Isa Anshary cenderung rigid dan Natsir lebih terbuka dengan demokrasi (Fauzan & Fata, 2019). Selain itu, Isa Anshary memiliki peran besar di dalam Masyumi sebagai juru bicara Masyumi wilayah Jawa Barat dan juga juru bicara dari M. Natsir. Walaupun pembahasan tentang Isa Anshary tidak dijelaskan secara spesifik, Isa Anshary tetap memberikan sumbangan yang signifikan terhadap Partai Masyumi secara keseluruhan (Madinier, 2013).

Mengacu kepada beberapa temuan di atas, artikel ini bertujuan untuk mengisi celah-celah yang masih kosong di dalam historiografi Islam Indonesia, antara lain dengan menyuguhkan Isa Anshary sebagai seorang ulama dan tokoh politik Masyumi yang termasuk sebagai fundamentalis dalam politik. Artikel ini diharapkan dapat memberikan sudut pandang baru terhadap perjuangan Isa Anshary di dalam arena politik di Indonesia pasca kemerdekaan.

METODE

Artikel ini merupakan penelitian historis yang menggunakan metode sejarah. Metode sejarah di dalam penelitian ini berfungsi untuk menganalisis, mendeskripsikan, dan merekonstruksi masa lampau berdasarkan tahapan-tahapan di dalam metode sejarah. Tahapan-tahapan tersebut adalah pengumpulan sumber (heuristik), kritik sumber, penafsiran, dan terakhir adalah penulisan sejarah atau historiografi (Abdurrahman, 2019, p. 35). Dalam penelitian sejarah, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah melacak sumber data historik-dokumenter, yakni peninggalan tertulis berupa buku-buku, arsip, dan dokumen. Penelitian ini merupakan kajian yang fokus pada Isa Anshary. Oleh karena itu, pengumpulan sumber primer, sekunder, maupun sezaman di dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (Madjid, 2014, p. 222), yakni dengan menelusuri berbagai perpustakaan yang memiliki koleksi buku tulisan langsung Isa Anshary atau arsip, maupun dokumen yang terkait dengan tema artikel ini.

Sumber primer dalam penelitian ini berupa buku tulisan M. Isa Anshary yang berjudul Barat dan Timur (1948), Falsafah Perjuangan Islam (1949), Sebuah Manifesto (1952), Islam dan Nasionalisme (1955), Bahaja Merah di Indonesia (1956), Manifes Perjuangan Persatuan Islam (1958), Tugas dan Peranan Generasi Muda Islam Dalam Pembinaan Orde Baru (1966), Mujahid Da'wah (1966). Penelitian ini juga menggunakan sumber sekunder yang berupa buku, artikel, koran, dan majalah. Sebagai penelitian kepustakaan, pengumpulan data yang telah dilakukan kemudian dikritisi secara obyektif, serta dilakukan penafsiran dengan kumulatif pengetahuan yang telah ada, dan direkonstruksi ke dalam historiografi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Isa Anshary

Isa Anshary lahir pada 1 Juli 1916 di Agam, Maninjau, Sumatera Barat. Isa Anshary dibesarkan dalam keluarga yang kental dengan nilai-nilai Islam. Bersama kedua orang tuanya, Isa Anshary kecil belajar tentang Islam. Selain itu, ia juga menimba ilmu di surau. Lingkungan yang seperti ini sangat mempengaruhi pemikiran dan kepribadian yang dimiliki olehnya. Saat remaja, Isa Anshary telah menjadi anggota organisasi Islam Muhammadiyah cabang Maninjau. Bahkan, ia juga menjadi kader Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) di Maninjau (Mohammad, 2008, p. 112).

Pendidikan Islam yang berasal dari kedua orang tuanya tersebut, kemudian Isa Anshary dikenal sebagai pemuda yang taat beragama dan tegas terhadap kebatilan. Isa Anshary memiliki keahlian dan performa yang sangat baik ketika berpidato. Bahkan dapat dipastikan jika ia berpidato maka akan dipenuhi massa yang ingin mendegarkannya. Massa yang hadir tidak hanya berasal dari partai-partai Islam saja, namun masyarakat umum

juga hadir untuk mendengarkan. Atas dasar hal tersebut, Isa Anshary diberi gelar “singa podium” (Wildan, 2015, p. 157).

Sebagai seorang ulama, Isa Anshary sangat mencintai ilmu pengetahuan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tulisan yang Isa Anshary tulis di dalam buku, majalah, maupun surat kabar. Pengetahuan yang dimiliki Isa Anshary tentu saja merupakan perjalanan panjang atas pendidikan yang ia tempuh. Isa Anshary menempuh pendidikan formal dan non-formal. Pendidikan formal yang dilalui Isa Anshary adalah Sekolah Rakyat (SR) yang berada di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Disamping Isa Anshary belajar di SR pagi hari, maka sore hingga malam harinya Isa Anshary belajar mengaji dan pengetahuan agama Islam di surau (Mohammad, 2008, p. 112)

Setelah mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat (SR), Isa Anshary tidak melanjutkan pendidikan formalnya. Pada usia 16 tahun, Isa Anshary memilih untuk meninggalkan kampung halamannya dan merantau ke Bandung, Jawa Barat. Langkah selanjutnya yang dilakukan Isa Anshary dalam melanjutkan pendidikannya adalah melalui pendidikan non formal, yakni dengan masuk Sekolah Agama, dan mengikuti kursus bahasa asing, politik, ekonomi, dan sosiologi. Di kota ini pula, Isa Anshary bertemu dengan Sukarno. Peremuannya dengan Sukarno ini dimanfaatkan Isa Anshary untuk mempelajari dan mengetahui pemikiran-pemikiran politik dan keagamaan yang dimiliki oleh Sukarno (Hidayat, 2018).

Pendidikan non-formal tersebut Isa Anshary tempuh dengan cara bergabung dengan organisasi politik, sosial, maupun keagamaan di Bandung seperti Pemuda Rakyat Indonesia (Partindo), Persis, Gabungan Politik Indonesia (GAPI), dan Muballigh Muhammadiyah cabang Bandung. Dengan bergabungnya Isa Anshary dalam berbagai organisasi tersebut, ia berhasil bertemu dengan tokoh-tokoh besar di dalam organisasi tersebut. Melalui pendekatan ini, Isa Anshary menyerap ilmu dari para tokoh dan berbagai ilmu yang didapatkan tersebut nantinya akan membentuk pandangan Isa Anshary dalam aspek politik dan agama.

Berdasarkan pendidikan yang ditempuh Isa Anshary, dapat dilihat bahwa Isa Anshary memiliki pribadi yang memanfaatkan sekecil apapun peluang untuk menuntut ilmu. Misalnya adalah ketika di Persis, Isa Anshary bertemu dengan Ahmad Hassan dan M. Natsir. Isa Anshary berhasil mendapatkan ilmu agama Islam yang mendalam dari seorang Ahmad Hassan, sedangkan pemahaman tentang hukum, politik, dan kenegaraan, Isa Anshary berhasil dapatkan dari sahabatnya yakni M. Natsir. Dengan bekal pengetahuannya tersebut, Isa Anshary mampu menyalurkan ilmunya di berbagai bidang, seperti menjadi penulis Surat Kabar Harian dan Madjalah Suara MIAI di Jakarta, Solo, Jogja, Medan, dan Bandung. Tidak hanya itu, dalam bidang politik Isa Anshary juga menjadi anggota parlemen RI (DPRS) dan anggota konstituante fraksi Masyumi (Wildan, 2008, p. xiv)

Pada 7 Desember 1949, Isa Anshary menjadi ketua umum Persis. Di dalam Persis, Isa Anshary fokus dalam kegiatan dakwah Islam. Semangat dakwah Islam yang dimiliki oleh Isa Anshary tersebut kemudian diimplementasikannya ke dalam arena politik. Pada zaman revolusi fisik, Isa Anshary merupakan seorang Kepala Penerangan partai Masyumi daerah Priangan. Hingga pada akhirnya ia mendapatkan amanah untuk menjadi ketua umum Partai Masyumi Jawa Barat pada tahun 1950 sampai 1954. Setelah itu, Isa Anshary menjadi Anggota Dewan Pimpinan Masyumi pada tahun 1954 hingga dibubarkannya partai Masyumi oleh rezim orde lama (Said, 2015, p. 13). Bersama partai Masyumi, karir politik Isa Anshary adalah dengan menjadi Anggota Parlemen Republik Indonesia pada tahun 1950 hingga 1960 dan ia juga merupakan Anggota Konstituante Republik Indonesia (Anshary, 1966, p. 312). Keberhasilan Isa Anshary di berbagai keahlian, merupakan hasil dari kerja kerasnya dalam menuntut ilmu selama hidupnya. Menurut Isa Anshary, menuntut ilmu adalah sebuah bekal untuk kemudahan hidup di dunia maupun akhirat (Anshary, 1952, p. 7).

Definisi dan Historisitas Fundamentalisme

Fundamentalisme memiliki arti bahwa seseorang atau kelompok orang yang setia dan patuh pada ajaran agama yang mendasar. Istilah fundamentalisme dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan *ushuli*, yakni orang-orang yang memegang teguh dasar-dasar agama. Pada awalnya pengertian fundamentalisme secara harfiah mengandung makna yang positif, yaitu konsisten dengan ajaran dasar agama, namun di dalam perkembangan sosio-historis kemudian fundamentalisme berubah menjadi konotasi negatif. Pengertian fundamentalisme itu sendiri kemudian di dalam sejarah mendapat pengaruh yang besar dalam aktifitas politik seseorang maupun kelompok dalam berdasarkan nilai-nilai keagamaan. Sehingga fundamentalisme dalam ruang geraknya selalu dikaitkan dengan sesuatu yang berhubungan dengan agama (Wibisono, 2017).

Fundamentalisme pertama kali muncul dalam gerakan Protestanisme pada awal abad ke-20 yang menggunakan Alkitab dan ditafsirkan secara tekstual, sehingga ajaran-ajaran Alkitab merupakan sesuatu yang wajib diimplementasikan secara mendasar bagi hidup umat Kristen. Kata fundamentalisme itu kemudian diperkenalkan oleh Protestanisme Amerika sebagai bentuk oposisi terhadap kaum Kristen liberal yang dianggap merusak keimanan Kristen. Bagi mereka, liberalisme telah menyebabkan desakralisasi Bibel yang merupakan ajaran suci di dalamnya (Khasanah, 2020). Fenomena fundamentalisme lainnya juga terdapat pada beberapa agama lainnya, seperti agama Yahudi yang meyakini kitab sucinya bahwa Masjid al-Aqsha harus dihancurkan demi memulihkan kembali Solomon Temple sebagai simbol keagamaan Yahudi. Demikian pula fundamentalisme yang terdapat pada agama Hindu. Sebuah partai politik di India, yakni Partai Bharatiya Janata (BJP) memiliki pandangan bahwa negara harus memiliki kebijakan luar negeri yang agresif dan berkarakter Hindu. Yang paling tampak dari kecenderungan fundamentalisme BJP ini adalah tuntutan untuk mendirikan Kuil Hindu dan meruntuhkan sebuah masjid kuno di Ayodhya. Kaum Hindu mempercayai bahwa Rama lahir di tempat tersebut. Akibatnya terjadilah kerusuhan antara akhir tahun 1990-1991, di mana lebih dari 1000 orang meninggal dunia dan 4000 orang terluka. Padahal, di India banyak masjid yang diidentifikasi pada periode Dinasti Islam Moghul menempati bekas situs kuil Hindu (Kamil, 2013, p. 255).

Dalam agama Islam, terdapat pula peristiwa historis yang menunjukkan gerakan fundamentalisme. Jauh sebelum terjadinya revolusi Iran, fundamentalisme Islam telah muncul dengan berbagai peristiwa sosio-historis yang terjadi pada kaum Muslim itu sendiri. Fundamentalisme Islam dibedakan menjadi dua, fundamentalisme pra-modern, dan fundamentalisme kontemporer atau neo-fundamentalisme. Fundamentalisme pra-modern memiliki ciri khas yang lebih *inward oriented* dan *original* karena disebabkan situasi dan kondisi tertentu di kalangan umat Muslimin sendiri. Fundamentalisme kontemporer muncul sebagai reaksi terhadap penetrasi sistem dan nilai sosial, budaya, politik, dan ekonomi Barat, baik sebagai akibat kontak langsung dengan Barat maupun melalui pemikir Muslim (Ali, 2018, p. 120).

Gerakan fundamentalisme Islam pra-modern yang pertama adalah gerakan fundamentalis Islam yang dipimpin oleh Muhammad bin Abdul al-Wahhab (1703-1792) di Semenanjung Arabia. Al-Wahhab menempuh pendidikannya di kalangan ulama reformis di Mekkah dan Madinah dan juga banyak dipengaruhi oleh gagasan pembaruan Ibnu Taimiyyah. Al-Wahhab melakukan sesuatu yang menurutnya adalah jihad terhadap kaum Muslim yang dipandang telah menyimpang dari ajaran Islam seperti praktik takhayul, bid'ah dan churafat (Azra, 2013, p. 283). Gerakan fundamentalisme Islam pra-modern kedua adalah gerakan Fara'idhi di Bengal (Bangladesh). Gerakan ini dikembangkan Haji Syari'at Allah (1781-1840), yang mana di dalamnya terdapat penekanan untuk memegang teguh syariat atau ajaran Al-Qur'an secara ketat. Syari'at Allah menggalang massa petani Muslim untuk melakukan jihad melawan kaum Hindu dan Inggris karena dirinya merasa terjadi disrupsi di dalam kehidupan masyarakat Muslim akibat kekuatan politik dan ekonomi Inggris di Bengal (Azra, 1996, p. 114).

Gerakan fundamentalis kontemporer yang pertama adalah gerakan al-Ikhwan al-

Muslimun (disingkat IM) yang didirikan oleh Hasan al-Banna di Mesir, pada 1928, yang kemudian gerakan ini menjadi dasar dari gerakan fundamentalis kontemporer selanjutnya di banyak bagian dunia Islam. Ideologi dari gerakan IM ini menekankan kemampuan Islam sebagai ideologi yang total dan komprehensif. Tujuan politik IM adalah pembentukan kekhalifahan yang terdiri dari negara-negara Muslim merdeka dan berdaulat. Estafet kepemimpinan IM kemudian dilanjutkan oleh Sayyid Quthb. Sebagai gerakan fundamentalis Islam, Sayyid Quthb kemudian menyerukan jalan jihad. Gerakan fundamentalis Quthb tentu saja tidak terlepas dari pengaruh reformis Islam sebelumnya seperti Muhammad Abduh dan Rasyid Ridla yang berpendapat bahwa jihad boleh dilakukan terhadap pihak non-Muslim hanya jika mereka mengganggu misi Islam atau menyerang kaum Muslim (Azra, 2016, p. 130).

Gerakan fundamentalisme kontemporer selanjutnya adalah pendirian organisasi Jama'at-I Islami oleh Abu al-A'la al-Mawdudi di India pada tahun 1941. Al-Mawdudi merupakan pemikir Muslim pertama yang dengan tegas mengutuk modernitas dan ketidaksesuaiannya dengan dan bahayanya terhadap Islam. Di dalam organisasinya tersebut, Al-Mawdudi memberikan pengaruh yang kuat dalam menanamkan nilai jihad. Al-Mawdudi berpendapat bahwa jihad merupakan perjuangan yang harus dilakukan kaum Muslim untuk mewujudkan cita Islam sebagai gerakan revolusioner internasional. (Mahendra, 1999, p. 81).

Dengan demikian, gejala fundamentalisme merupakan peristiwa kompleks, yang tidak terjadi pada satu agama saja, namun dapat terjadi pada berbagai agama. Fundamentalisme yang terjadi pada berbagai agama ini tentu saja tidak muncul sebagai faktor tunggal, melainkan terdapat pula faktor-faktor lain yang mendukung, seperti politik, sosial-budaya, geografi, dan juga ekonomi (Khamdan, 2018).

Fundamentalisme pada Isa Anshary

Perkembangan di masa modern, Islam tetap hadir dalam memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan, seperti sosial, ekonomi, budaya, bahkan politik. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa kompleksitas Islam tidak akan pernah kehilangan signifikansinya sebagai sistem kepercayaan. Dalam catatan historis, gerakan fundamentalisme banyak terjadi di negara Barat, Timur Tengah, Asia Selatan dan penjuru dunia lainnya. Salah satu tokoh fundamentalisme di Indonesia adalah Isa Anshary. Seseorang atau kelompok bisa dikategorikan ke dalam golongan fundamentalisme jika memiliki ciri-ciri, antara lain, cenderung menafsirkan teks-teks keagamaan secara absolut, dogmatis, kaku dan tekstual, memonopoli kebenaran atas tafsir agama, dan memandang kelompok lain yang tidak sejalan adalah salah dan sesat, meyakini sepenuh hati tentang integrasi agama dan negara, menganggap bahwa Barat merupakan ancaman bagi akidah dan imperialisme yang berbahaya, selalu memerangi paham dan tindakan yang dianggap secular, dan sebagiannya cenderung berpikir dan bertidak radikal, yakni menggunakan narasi dan cara-cara kekerasan dalam memperjuangkan sesuatu yang diyakininya, ketika berhadapan dengan kemodernan dan sekularisasi yang dinilainya mendegradasi akidah (Kamil, 2013, p. 251).

Seperti yang telah disebutkan di muka, bahwa pada dasarnya istilah fundamentalisme pertama kali muncul dalam gerakan Protestanisme di Barat yang menafsirkan kitab suci secara literal. Fundamentalisme merupakan gerakan radikalisme dan terorisme yang berimplikasi politik dan membahayakan bagi negara industri di Barat (Fatoni, 2018). Namun, labeling fundamentalisme beserta ciri-ciri yang terdapat pada diri Isa Anshary bukanlah demikian. Fundamentalisme pada Isa Anshary adalah fundamentalisme yang mengacu kepada purifikasi atau kembalinya kepada prinsip-prinsip Islam yang mendasar dan kembali kepada kemurnian ajaran al-Qur'an dan Hadits (Mahendra, 1999, p. 11). Fundamentalisme yang terdapat pada Isa Anshary bukanlah sebuah gerakan yang mengacu kepada aksi revolusioner seperti membuat gerakan seperti Daarul Islam dan Tentara Islam Indonesia (Harianto, 2022) atau bahkan terorisme. Sebenarnya, hanya ada

beberapa kelompok kecil dari kalangan fundamentalis yang melakukan tindakan terorisme (Sulaeman, 2019). Fundamentalisme dalam konteks ini lebih berkaitan dengan seruan untuk kembali ke ajaran agama yang dasar, dan menafsirkan al-Qur'an fundamental bagi kehidupan manusia (Suryani, 2017). Jadi, fundamentalisme Isa Anshary merupakan sebuah upaya kembali kepada kemurnian ajaran Islam yang diimplementasikan sebagai aktifisme Islam dalam perpolitikan di Indonesia pasca kemerdekaan (Mustaqim, 2015).

Sikap fundamentalisme Isa Anshary di dalam berpolitik merupakan hasil dari pengaruh-pengaruh yang diterimanya. Fundamentalisme yang terdapat pada Isa Anshary justru mendapat banyak pengaruh dari tokoh-tokoh modernis abad ke-19 seperti al-Afghani, Abduh, dan Ridla, yang ketiganya merupakan tokoh reformisme Islam yang berfokus pada pemurnian Islam (Burhanudin, 2012, p. 262). Pengaruh tokoh-tokoh tersebut dapat ditemukan di berbagai tulisan Isa Anshary. Isa Anshary mendapat pengaruh dari pemikiran al-Afghani yang sering dikutip dalam karyanya seperti tampak pada kutipan berikut.

Dalam 'Al-Urwatul Wutsqa', madjallah progresif radikal jang terbit di Paris, Djamaluddin Al Afghany djuru bitjara Pan Islamisme jang masjihur itu, pernah melahirkan ratap-tangisnja, dikala melihat kerusakan dan kelemahan kaum Muslimin dengan utjapan saju. 'Wahai, berteriaklah kiranja seorang penasehat dari antara engkau. Membangunkan jang lemah. Menjadarkan jang tidur, menundjukkan jang sesat, kepada djalan jang lurus!'. Sesungguhnja, karena meninggalkan djedjak sunnah Nabi jang utama itu, maka dan lemah dan lupalah kaum Muslimin untuk menangkap dan menggunakan api jang terkandung dalam adjaran agamanja (Anshary, 1955, p. 62).

Berdasarkan kutipan tersebut, tampak Isa Anshary mendapatkan pengaruh yang kuat dari al-Afghani, terutama pada aspek integrasi atau kesatuan antara politik dan Islam. Hal tersebut disebabkan al-Afghani merupakan pencetus ide Pan-Islamisme yang mengajarkan persatuan seluruh muslim di dunia Internasional dalam melawan kolonialisme dengan berpegang pada tema-tema ajaran Islam (Nasbi, 2019). Isa Anshary juga mendapatkan pengaruh dari Muhammad Abduh. Di dalam bukunya, Isa Anshary seringkali mengutip perkataan Muhammad Abduh, sebagai berikut.

Jang mulia Sjeich Muhammad Abduh di dalam kitabnja Risalatut-tauhid telah memberikan penerangan jang sangat menarik, diantaranya alim besar itu berkata bahwa "pikirkanlah apa jang didjadikan Allah, tetapi djangan dipikirkan tentang zat Allah, supaja djangan kamu binasa. Kalau kita pikirkan akal manusia, nyatalah sedjauh-djauh perhentian dan pendapatannja dan kesempurnaannja, hanjalah sampai kepada mengetahui sifat-sifat setengah jang ada ini, jang djatuh kebawah pendapatan pantjaindra, atau perasaan, atau jang dapat ditjapai oleh akal, atau sampai hingga mengetahui tempat timbulnja. Boleh djuga memperdapat kulliat dan segala mu'nja, atau sekadar mengetahui beberapa qaidah dari sifat-sifat jang mendatang atasnja" (Anshary, 1955, p. 33).

Isa Anshary mempelajari rasionalitas dalam Islam dari Abduh yang cenderung menggunakan kekuatan akal dan tetap memegang teks-teks agama. Pemikiran Abduh yang mendalam memberikan pengaruh yang besar pula pada berdirinya gerakan pembaharuan di Indonesia seperti Muhammadiyah dan Persatuan Islam yang mana keduanya merupakan organisasi Islam yang digeluti oleh Isa Anshary (Abbas, 2014, p. 64). Isa Anshary juga memperhatikan pemikiran Rasyid Ridha, yang terlihat pada kutipan berikut.

Setelah kedua pendekar Islam (al-Afghani dan Abduh) wafat, maka Sjeich Rasyid Ridla tampil sebagai penerusnya. Beliau menyampaikan bahwa "Almanaar merupakan madjalah yang membuka mata kaum Muslimin seluruh dunia. Tulisan-tulisan di dalamnja senantiasa memberi pimpinan kepada ummat Islam seluruhnja dalam soal-soal keagamaan dan perdjungan. Kita tidak menyatu-tarafkan utjapan dan tulisan Almanaar dengan Qur'an dan Sunnah. Djustru segala tulisan dan utjapan Almanaar itu sumbernja adalah Qur'an dan Sunnah" (Anshary, 1955, p. 40).

Dari Rasyid Ridha, Isa Anshary memperoleh pemahaman tentang purifikasi Islam,

yakni gerakan pemurnian ajaran Islam yang tetap memegang teguh pada ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah di dalam berbagai aspek kehidupan (Burhanudin, 2021). Selain belajar dari tokoh-tokoh mancanegara, Isa Anshary juga belajar Ahmad Hassan. Hassan merupakan tokoh yang berkontribusi besar dalam mewarnai pemahaman pemikiran Isa Anshary. Hassan lebih dekat kepada Rasyid Ridha daripada Muhammad Abduh, sehingga ciri khas dari pemikiran Hassan terletak pada keteguhan pada teks Al-Qur'an dan As-Sunnah (Bachtiar, 2018, p. 144). Di dalam karyanya, Isa Anshary juga mengutip tulisan-tulisan maupun ucapan Hassan, salah satunya adalah sebagai berikut.

Pimpinan Negara yang begitu sifatnya, gerak-tindaknya selain harus menjalankan Sjura sebagai melakukan asas demokrasi, tetapi juga ia memegang kebenaran-muthlak sebagai pimpinan yang bersandikan haq daripada Allah swt. Dalam pandangan Islam juga demikian adanya. Tuan A. Hassan dalam bukunya *Pemerintahan Tjara Islam* halaman 11 menulis “Hinga empat chalifah dalam Islam, terpilih setjara demokrasi. Mulai chalifah Mu'awiyah dengan kekuatan pedang, pangkat chalifah itu, dijadikan warisan. Dari situ hingga gugur kebesaran dan kehebatan Islam, berlau terus tjara yang tidak diizinkan oleh Islam itu, ketjuali satu dua peristiwa menjelang sistem warisan itu” (Anshary, 1955, p. 218).

Dari Al-Afghani, integrasi Islam merupakan ide pokok yang didapatkan Isa Anshary, dari Abduh, pengaruh rasionalitas dalam beragama, sedangkan dari Ridla, konsep pemurnian ajaran al-Qur'an dan Hadits yang diperoleh (Adiwilaga, 2017). Berbeda dengan mereka, melalui Hassan, Isa Anshary bertemu dan berguru langsung kepadanya. Pengalaman mempelajari fiqh yang mendalam memberikan pengaruh besar Isa Anshary untuk memiliki pemahaman tentang integrasi antara agama dengan negara (Hizbullah, 2014). Pemahaman tersebut yang menjadikannya mengimplementasikan pengetahuannya dengan ikut terjun ke dalam partai politik. Isa Anshary memiliki dasar pemahaman keagamaan yang kuat, sehingga memiliki sikap yang keras di dalam berpolitik (Bachtiar, 2018, p. 111).

Implementasi dalam Arena Politik

Isa Anshary merupakan salah satu nama penting dari beberapa tokoh Islam pasca kemerdekaan yang tidak hanya terkenal sebagai ulama, melainkan juga sebagai tokoh politik yang memberikan dampak signifikan di dalam perpolitikan di Indonesia. Dalam berpolitik, Isa Anshary dikenal sebagai tokoh yang keras dalam menyuarakan ideologi Islam (Al-Barbasy, 2017, p. 85), maka dari itu dirinya termasuk dalam golongan fundamentalisme. Bahkan, Achmad Syahid menyebutnya sebagai “ulama oposan”. Tergolongnya Isa Anshary sebagai fundamentalisme hingga disebut sebagai ulama oposan, hal tersebut bukanlah tanpa alasan. Sikap yang ditunjukkan Isa Anshary merupakan sebuah respon yang disebabkan kondisi politik pasca kemerdekaan Indonesia dianggap kurang menguntungkan bagi umat Islam, terlebih lagi ketika kekuatan besar Sukarno dengan PNI yang menunjukkan solidaritasnya dengan PKI, yang mana PKI merupakan lawan ideologi maupun politik Isa Anshary di dalam Masyumi (Syahid, 2019, p. 32).

Sebagai politikus Partai Masyumi, Isa Anshary selalu mendengungkan ideologi yang tepat untuk dasar negara Indonesia adalah Islam. Oleh karena itu, PNI beserta PKI melakukan hal serupa dengan mengkampanyekan politik anti Islam yang digaungkan oleh Masyumi. Pada mulanya, Isa Anshary memberikan pandangan bahwa dirinya sejalan dengan Pancasila sebagai ideologi negara. Namun karena PKI berada di bawah perlindungan Sukarno (“PKI menerima Pancasila sebagai dasar politik Republik Indonesia, DN Aidit: Persatuan Nasional bukan soal insidenti,” 1954), maka Isa Anshary melawannya di dalam medan politik. Hal tersebut terdapat dalam kutipan koran *De Nieuwsgier* tahun 1954, berikut ungkapannya:

Kjai hadji Isa Anshary gaf in zijn rede een uiteenzetting van de Pantja Slla met betrekking tot de Islam, die hij noch strijdig noch identiek met de Islamietische leer vond. Kjai Isa Anshary waarschuwde de aanwezigen, dat de uitslag van de komende alge-

mene verkiezingen het lot van de Islamieten in Indonesië zal bepalen, ongeacht of deze Islamieten leden zijn van de PSII, NU of de Masjumi. Hij drong aan op eensgezindheid van, de Islamieten. (“Isa Over Pantja Sila,” 1954).

Isa Anshary dalam pidatonya memberikan eksposisi Pantjasila tentang Islam, yang menurutnya tidak bertentangan atau identik dengan ajaran Islam. Isa Anshary mengingatkan mereka yang hadir bahwa hasil pemilu mendatang akan menentukan nasib umat Islam di Indonesia, terlepas dari apakah mereka anggota PSII, NU, atau Masyumi. Dia bersikeras pada kebulatan suara di antara kaum Islam.

Selain alasan politis, alasan Isa Anshary memperjuangkan Islam sebagai dasar negara adalah alasan ideologis. Menurutnya, ideologi Islam telah terintegrasi dengan seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk aspek politik. Oleh karena itu, nafas perjuangan ideologi Islam harus senantiasa ditegakkan di dalam politik. Di sisi lain, ia menilai bahwa terdapat ideologi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, yakni ideologi komunis yang terdapat pada PKI. Ideologi ini berpijak pada filsafat materialisme yang menganggap bahwa realitas hanya satu yaitu benda (materi). Pada ajaran materialisme ini tidak ada sesuatu hal yang di luar kebendaan (imateri). Dalam hal tersebut, Tuhan merupakan sesuatu yang tidak terlihat dan tidak berwujud. Oleh karena itu, kepercayaan Marxisme dalam ajaran materialisme adalah tidak mengakui adanya Tuhan (ateis) (Anshary, 1956, p. 5). Berikut kutipannya:

Filosofie Marxisme ialah Historis materialisme, suatu ajaran yang mengatakan, bahwa seluruh gerakan dan kemajuan, segala beweging dan ontwikkeling manusia ditentukan oleh tjaranja manusia hidup dan makan, ditentukan oleh perhubungan maddi-ekonomis. Marxisme merupakan ajaran yang mengukur segala susunan dan bentuk, kemajuan serta peradaban manusia dengan nilai kebendaan. Marxisme menolak adanya unsur-unsur kedjiwaan, faktor ruhaniah, djiwa, dan semangat. Filosofie marxisme juga sejalan dengan ajaran Darwinisme yang mengadakan hukum evolusi alam organik, yang menetapkan asal kedjadian manusia dari kera (monjet). Materialisme atau marxisme pada hakekatnya adalah kejakinan menuhankan alam benda (*stofvergoding*). Menurut Marx, agama hanya bajangan kajali pikiran orang dan agama merupakan tjandu bagi masjarakat (Anshary, 1956, pp. 5–9).

Atas dasar ideologi komunis ini, PKI menggunakan praktik politik yang mereka sebut sebagai gerakan revolusioner. Melalui gerakan revolusionernya itu, PKI melakukan aksi konfrontatif kepada tokoh Islam seperti politisi Islam di dalam sidang majelis konstituante (Mun'im, 2013, p. 101). Bahkan lebih dari itu, gerakan revolusioner PKI tersebut juga tidak segan-segan untuk membunuh kyai, santri, maupun tokoh pimpinan partai Islam yang dianggap menghalangi langkah politiknya (Afifi & Zuharon, 2020, p. 22).

Sikap politik keji yang ditunjukkan oleh PKI membuat Isa Anshary melakukan berbagai manifesto untuk menyelamatkan aqidah umat Islam dari ideologi komunis. Isa Anshary melakukan berbagai pidato politik untuk memberi kesadaran bagi umat Islam tentang isu komunisme. Salah satu pidatonya adalah kampanye terbuka di hadapan lima puluh ribu peserta yang menyaksikan di Stadion Ikada. Isa Anshary mengimbau kepada umat Islam agar bersatu dalam pemilu tahun 1955 agar bisa mengalahkan musuh-musuh Islam dalam pentas politik. Hal ini sebagaimana yang terdapat di dalam koran *Java Bode* yang terbit pada 4 Februari 1954 dalam judul artikel “*Herdenking Hemelvaart Muhammad Beroep Isa Anshary Op Islamietsche Partijen*”, berikut arti kutipannya:

Dalam rangka memperingati kenaikan Nabi Muhammad SAW, diadakan acara pentas besar pada Kamis pagi di Stadion Ikada Djakarta, di mana antara lain M. Isa Anshary berpidato kepada umat yang berkumpul. Isa Anshary mengimbau pihak partai Islam, Masyumi, Nahdatul Ulama, dan PSII, untuk melepaskan pakaian luar mereka dan bersatu. Jika para Islamis tidak bersatu, maka prediksi para penentang Islam bahwa kita akan dikalahkan akan menjadi kenyataan. Sebelum pertemuan di stadion yang dihadiri 50.000 umat Islam itu, aparat negara telah mengambil tindakan khusus untuk mencegah terjadinya insiden. Pertemuan tersebut diselenggarakan oleh BKOI (contact body ormas Islam/pengawal umat Islam) mengalami perkembangan yang teratur

(“Herdenking Hemelvaart Muhammad Beroep Isa Anshary Op Islamietsche Partijen; Masjumi, NU en PSII,” 1954).

Selain menyampaikan pidato politiknya, Isa Anshary juga mendirikan gerakan Front Anti Komunis (FAK) sebagai langkah untuk menjaga ideologi Islam dan melawan PKI di arena politik pada 12 September 1954 di Bandung, Jawa Barat. FAK bukanlah gerakan politik tetapi merupakan gerakan yang bertujuan untuk membendung laju komunisme PKI yang gencar dengan cara menuliskan nilai-nilai keislaman dalam buku, majalah, koran-koran, maupun pamflet. Walaupun FAK bukan sayap kanan dari Masyumi, tidak jarang pula FAK membantu manifesto yang dilakukan tokoh Islam dalam melawan PKI (“Masjumi Wilajah Jawa Barat Bentuk Front Anti Komunis,” 20 September 1954).

Dengan dibentuknya gerakan FAK, Aidit selaku pimpinan PKI merasa terganggu dengan pergerakan FAK. Hal tersebut terdapat dalam kutipan koran Aidit yang menyatakan bahwa FAK merupakan sebuah ancaman untuk PKI. Pemikiran seperti ini dapat ditemukan pada kutipanberikut.

Front Anti Komunis jang terang-terangan di Djawa Barat dan di Djawa Timur dengan tudjuan membendung bahaja komunis dan menjelamatkan negara dari kebangkrutan dan perbudakan, front mana adalah dengan dipimpin oleh pemuka-pemuka Masjumi, dikatakan oleh Aidit tindakan jang akan menantang komunisme itu sebagai anak-anak buah Van der Plas (“Aidit Mengkhawatiri Front Anti Komunis,” 1954).

Merasa terganggu dengan adanya gerakan FAK, Njoto yang juga sebagai elit PKI meminta kepada Sukarno agar FAK dibubarkan (“Djika tolerant, bubarkan front anti komunis dan front anti marhaenis!,” 1955). Pada akhirnya, tahun 1958 Presiden Sukarno membubarkan FAK dengan alasan mengganggu jalannya orde lama yang sedang berlangsung (Fauzan, 2019, p. 120).

Berbagai upaya dilakukan Isa Anshary di dalam perpolitikan demi terwujudnya ideologi Islam dan juga ia tidak ingin Indonesia menjadi negara komunis dan sekular seperti Soviet atau bahkan China, yang mana kedua negara tersebut merupakan pusat dari komunisme dunia (Vey, 2017, p. 145). Upaya pamungkasnya tersebut dilakukan ketika berada di dalam majelis konstituante (Orsan, 2019, p. 156). Perdebatan panjang di dalam sidang konstituante harus berakhir dengan dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. Selain itu, wadah perjuangan politik Isa Anshary, yakni Masyumi, juga dibubarkan oleh Sukarno pada tahun 1960 (Said, 2015, p. 231). Dengan dibubarkannya Masyumi, maka langkah politik Isa Anshary beserta tokoh Islam lainnya menjadi terhenti. Namun satu hal yang menjadi penting adalah, dibubarkannya Masyumi bukan berarti perjuangan ideologi Islam menjadi berhenti. Isa Anshary dan tokoh Islam eks-Masyumi kemudian mendirikan Dewan Da’wah Islamiyyah Indonesia (DDII). Berdirinya DDII diharapkan akan terciptanya kader-kader pejuang Islam penerus bangsa yang memiliki aqidah yang kuat yang terbebas dari ideologi komunisme, sekularisme, liberalisme, dan ateisme (Bachtiar & Fauzan, 2019, p. 35).

Perjuangan Isa Anshary menegakkan ideologi Islam secara fundamental tersebut kemudian berakhir ketika ia wafat pada 11 Desember 1969, bertepatan dengan 2 Syawal 1389 H, di Bandung, Jawa Barat. Isa Anshary wafat dalam usia 53 tahun. Wafatnya Isa Anshary meninggalkan duka yang mendalam bagi seluruh anggota DDII dan pejuang Islam lainnya, serta menjadikan Isa Anshary sebagai panutan dalam sosok yang gigih terhadap perjuangan agama dan negara. Isa Anshary memberikan contoh kepada generasi penerus agar memahami makna dari ajaran al-Qur’an dan Hadits dengan benar, serta menjadikan Islam sebagai ruh dan spirit perjuangan dalam partisipasi politik. Hal tersebut merupakan bukti pengabdianya untuk menjaga agama Islam dan keutuhan bangsa Indonesia (Fogg, 2020, p. 78). Isa Anshary berhasil memberikan perlawanan melalui ide-ide besar kebangsaan secara ideologis dan menunjukkan sikap politis yang sesuai dengan konstitusi terhadap kaum sekular dan komunis dalam PKI, sehingga membuat mereka tidak leluasa di dalam pentas politik nasional (Caesara, 2021).

KESIMPULAN

Isa Anshary merupakan salah satu deretan pejuang politik Islam yang menarik untuk dikaji dalam perjalanan politiknya. Isa Anshary di dalam beberapa literatur disebut sebagai salah satu ulama sekaligus politikus Islam yang tergolong fundamentalis. Fundamentalisme dalam diri Isa Anshary disebabkan pengaruh bacaan karya-karya para tokoh reformis Islam dari berbagai tokoh seperti Jamaludin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rayid Ridha. Selain itu Isa Anshary juga mendapatkan pengaruh besar dari Ahmad Hassan yang merupakan ahli fiqh di dalam Persis. Ditambah lagi, kondisi iklim politik Indonesia yang baru saja merdeka, sehingga masih rentan terjadi pergolakan politik. Fundamentalisme Isa Anshary kemudian diimplementasikan melalui arena politik demi menegakkan ideologi Islam dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pembahasan secara spesifik biografi politik deretan para tokoh bangsa Indonesia masih banyak belum diungkap. Hal ini merupakan tugas para sejarawan dan peminat sejarah untuk menggali informasi yang mendalam.

DAFTAR REFERENSI

- Abbas, N. (2014). Muhammad Abduh: Konsep rasionalisme dalam Islam. *Jurnal Dakwah Tabligh, Vol.15 No.1*.
- Abdurrahman, D. (2019). *Metodologi penelitian sejarah Islam*. Ombak.
- Adiwilaga, R. (2017). Puritanisme dan fundamentalisme dalam Islam transnasional serta implikasinya terhadap Pancasila sebagai ideologi. *Journal of Governance, Vol.2, No.1*, 126–145.
- Afifi, A. & Zuharon, T. (2020). *Banjir darah: Kisah nyata aksi PKI terhadap kiai, santri, dan kaum muslimin*. Istanbul.
- Ahdar. (2017). Tinjauan kritis dan menyeluruh terhadap fundamentalisme dan radikalisme masa kini. *Jurnal Kuriositas, Vol.11, No.1*, 19–36.
- Aidit Mengkhawatiri Front Ant Komunis. (1954, Oktober). *Suara Masjumi*.
- Al-Barbasy, M. M. (2017). *Politik perda syariah: Dialektika Islam dan Pancasila di Indonesia*. Suara Muhammadiyah.
- Ali, N. H. (2018). Gerakan fundamentalisme Islam di Indonesia: Perspektif sosio-historis. *Jurnal UIN Raden Fatah*.
- Anshary, M. I. (1952). *Sebuah manifesto*. Pasifik.
- Anshary, M. I. (1955). *Islam dan nasionalisme*. Pustaka Djihad.
- Anshary, M. I. (1966). *Mujahid da'wah*. Diponegoro.
- Anshary, M. I. (n.d.). *Falsafah perjuangannya Islam*. Saiful Medan.
- Anshary, M. I., dkk. (1956). *Bahaja merah di Indonesia*. Front Anti Komunis.
- Azra, A. (1996). *Pergolakan politik Islam: Dari fundamentalisme, modernisme, hingga post-modernisme*. Paramadina.
- Azra, A. (2013). *Jaringan ulama Timur Tengah abad XVII-XVIII*. Kencana.
- Azra, A. (2016). *Transformasi politik Islam: Radikalisme, khilafatisme, dan demokrasi*. Prenada Media Grup.
- Bachtiar, T. A. (2018). *Jas Mewah: Jangan sekali-kali melupakan sejarah & dakwah*. Pro-U Media.
- Bachtiar, T. A. & Fauzan, P. I. (2019). *Sejarah pemikiran dan gerakan politik Persis*. Persis Press.

- Burhanudin, J. (2012). *Ulama dan kekuasaan: Pergumulan elite muslim dalam sejarah Indonesia*. Mizan.
- Burhanudin, J. (2021). The triumph of the second leaders: Ahmad Khatib and Rashid Rida in Islamic reform in Indonesia. *Journal Afkaruna, Vol.17 No.2*, 171–201.
- Caesara, W. Y., Adeline Dinda. (2021). Karena faktor agama atau gaya berpikir? Peran fundamentalisme agama dan need for closure dalam memprediksi toleransi politik. *Jurnal Psikologi Sosial, Vol. 19, No.3*, 170–179.
- Djika toleran, bubarkan front anti komunis dan front anti marhaenis! (1955, September 21). *Harian Rakjat*.
- Fatoni, S. (2018). Pembaruan regulasi terorisme dalam menangkal radikalisme dan fundamentalisme. *Jurnal Al-Tahrir, Vol. 18, No.1*, 219–241.
- Fauzan, P. I. & Fata, A.K. (2019). Portraying political polarization in Persatuan Islam in the case of Mohamad Natsir vs Isa Anshary. *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies, Vol 3, No.2*, 205–232.
- Fauzan, P. I. (2019). *Negara Pancasila vis-à-vis negara Islam; Pemikiran politik M. Natsir dan M. Isa Anshary (1945-1960)*. STAIPi Garut Press.
- Feith, H. (1995). *Pemikiran politik Indonesia 1945-1965*. LP3ES.
- Fogg, K. W. (2020). *Spirit Islam pada masa revolusi Indonesia* (Terjemahan Yanto Musthofa). Mizan Republika Press.
- Hariato. (2022). Perlawanan DI/TII terhadap negara (Studi terhadap gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan). *Historia: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah, Vol. 10, No.1*, 101–110.
- Herdenking Hemelvaart Muhammad Beroep Isa Anshary Op Islamietsche Partijen; Masjumi, NU en PSII. (1954, Februari 4). *Java Bode*.
- Hidayat, S. & K. W. F. (2018). *Profil anggota konstituante KH. Muhammad Isa Anshary*. Konstituante Republik Indonesia.
- Hizbullah, N. (2014). Ahmad Hassan: Kontribusi ulama dan pejuang pemikiran Islam di nusantara dan semenanjung Melayu. *Al-Turas, Vol. XX, No. 2*, 285–296.
- Isa Over Pantja Sila. (1954, Juni 7). *De Niwuesgier*.
- Kamil, S. (2013). *Pemikiran politik Islam tematik*. Prenada Media Grup.
- Khamdan, M., Wiharyani. (2018). Mobilisasi politik identitas dan kontestasi gerakan fundamentalis. *Jurnal Al-Tahrir, Vol.18, No.1*, 193–218.
- Khasanah, N., et. al. (2020). Fenomena fundamentalisme Islam dalam perspektif antropologi. *Mizan: Journal of Islamic Law, Vol.4, No.2*, 171–180.
- Madinier, R. (2013). *Partai Masjumi: Antara godaan demokrasi dan Islam integral*. Mizan.
- Madjid, D. dan J. W. (2014). *Ilmu sejarah sebuah pengantar*. Kencana Prenada Media Grup.
- Mahendra, Y. I. (1999). *Modernisme dan fundamentalisme dalam politik Islam: Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Jama'at-i Islami (Pakistan)*. Paramadina.
- Masjumi Wilajah Jawa Barat Bentuk Front Anti Komunis. (20 September 1954). *Suara Masjumi*.
- Mikail, K. (2020). Problem doktrin keagamaan dan fundamentalisme dalam membangun budaya multikultural. *Journal of Darussalam Islamic Studies, Vol. 1, No.1*, 12–19.

- Mohammad, H. (2008). *Tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh abad 20*. Gema Insani.
- Mulia, S. M. (2021). Melawan fundamentalisme: Memanusiakan manusia. *Jurnal Ar-Risalah, Vol 7, No.2*, 1–15.
- Mun'im, A. (2013). *Benturan NU-PKI 1948-1965*. Langgar Swadaya & PBNU.
- Mustaqim, M. M., Muhammad. (2015). Tantangan negara-bangsa (nation-state) dalam menghadapi fundamentalisme Islam. *Journal Addin, Vol.9, No.1*, 85–106.
- Nasbi, I. (2019). Jamaluddin Al-Afghani (Pan-Islamisme dan ide lainnya). *Jurnal Diskursus Islam, Vol.7 No 1*.
- Noer, D. (1987). *Partai Islam di pentas nasional*. Pustaka Utama Grafiti.
- Nugraha, M. T. (2018). Fundamentalisme pendidikan agama di jejaring sosial. *Jurnal Al-Tahrir, Vol. 18, No.1*, 41–62.
- Orsan, M. (2019). *Menuju Republik Indonesia berdasarkan Islam*. Segars Arsy.
- PKI menerima Pantjasila sebagai dasar politik Republik Indonesia, DN Aidit: Persatuan nasional bukan soal insident. (1954, November 11). *Harian Rakjat*.
- Said, H. S. (2015). *Gestapu 65*. Mizan.
- Samsuri. (2004). *Politik Islam anti komunis; pergumulan Masyumi dan PKI di arena demokrasi liberal*. Safiria Insania Press.
- Suhelmi, A. (2014). *Polemik negara Islam Soekarno vs Natsir*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Sulaeman, M. (2019). Permainan bahasa atas tuduhan gerakan fundamentalisme Islam dalam politik barat. *Jurnal Ilmu-ilmu Ushuludin, Vol. 7, No.1*, 55–72.
- Suryani, T. (2017). Terorisme dan deradikalisasi. *Jurnal Keamanan Nasional, Vol. 3, No.2*, 271–293.
- Syahid, A. (2019). *Islam nusantara: Relasi agama-budaya dan tendensi kuasa ulama*. Rajawali Press.
- Vey, R. M. (2017). *Kemunculan komunisme di Indonesia*. Komunitas Bambu.
- Wibisono, S., et. al. (2017). Orientasi keberagamaan ekstrinsik dan fundamentalisme agama pada mahasiswa muslim: Analisis dengan model Rasch. *Jurnal Psikologi Sosial, Vol. 5, No.1*, 1–11.
- Wildan, D. (2008). *Yang da'i yang politikus*. Remaja Rosdakarya.
- Wildan, D. et.al. (2015). *Gerakan dakwah persatuan Islam*. Amanah Publishing.



© 2022 by Yusril Fahmi Adam, Imas Emalia
This work is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License (CC BY SA)